

Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda

Erdianto Effendi², Tito Handoko²

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana. Penelitian ini urgen untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang menjadi musuh dunia. Melalui pendekatan non penal, perlu ditempuh alternatif pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non penal di luar hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI.

Kata kunci: HMI; Non Penal; Terorisme

Abstract

This study aims to examine and analyze efforts to solve terrorism crimes using approaches outside criminal law. Through a non-penal approach, it is necessary to take alternative precautions for criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical with a statutory approach, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this study concluded that non-penal policies outside the criminal law in tackling terrorism among young people and students can be done by student participation in extra-campus organizations such as HMI.

Keywords: HMI; Non Penal; Terrorism

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme yang terjadi di dunia menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa bagi umat manusia.¹ Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme menguat pasca ambruknya Gedung World Trade Center di New York. Jauh sebelum itu, berbagai tindakan terror pun sudah kerap terjadi di berbagai belahan dunia.² Pasca tragedy WTC, perhatian para peneliti terhadap gerakan terorisme juga meningkat.³ Di sisi lain, di Indonesia berkembang pula pemikiran bahwa isu terorisme pasca tragedi WTC sengaja diciptakan barat.⁴

Indonesia seringkali dituding sebagai salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh suburnya tindakan terorisme. Antara 2001 dan 2017, sebanyak 182 kasus teroris telah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut antara lain bom Bali, bom Kedutaan Besar Australia, bom Ritz Charlton, dan terorisme Poso.⁵ Tindakan terorisme berawal dari paham radikal yang kadangkala berangkat dari pemahaman agama.⁶ Meski sejatinya tindakan terror tidak terkait dengan isu agama, kenyataannya menunjukkan bahwa tindakan terror berawal dari kajian yang menyimpang dari ajaran agama yang memandang agama lain sebagai ancaman.

Karena berangkat dari pemahaman agama maka sejumlah tindakan radikal yang berkembang menjadi perilaku teror dan paham terorisme menjadi sulit untuk diberantas di Indonesia. Orang yang terlibat dalam gerakan terorisme berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelaksanaan tugas suci untuk dan atas nama agama. Suatu perbuatan yang didorong kepercayaan atas agama dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kebaikan atas nama agama membuat perilaku tertentu yang tergolong radikal dan menjurus kepada praktek-praktek teror menjadi sulit untuk diberantas.

Praktik-praktik terorisme yang terjadi di Indonesia ditengarai bermula dari kalangan muda yaitu pelajar dan mahasiswa. Menurut Zaki Mubarak, semakin banyak kelompok muda yang terlibat jaringan terorisme, membuktikan bahwa perguruan tinggi dan sekolah semakin rentan dari pengaruh gerakan terorisme melalui penyebaran paham keagamaan yang ekstrim.⁷

¹ Heru Susetyo Nuswanto, 'Terrorism as Socially Constructed Crime in Indonesia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2019), 266–86 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4>>.

² Lee Jarvis, 'Critical Terrorism Studies and the Far-Right: Beyond Problems and Solutions?', *Critical Studies on Terrorism*, 15.1 (2022), 13–37 <<https://doi.org/10.1080/17539153.2021.2017484>>.

³ Brian J. Phillips, 'How Did 9/11 Affect Terrorism Research? Examining Articles and Authors, 1970–2019', *Terrorism and Political Violence*, 00.00 (2021), 1–24 <<https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1935889>>.

⁴ Agus Subagyo, 'The Implementation of the Pentahelix Model for the Terrorism Deradicalization Program in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>>.

⁵ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5.1 (2021), 63–83 <<https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>>.

⁶ Muhaimin Zulhair Achsin, 'Culture and Role of Woman in Terrorism in Indonesia. Case Studies: Suicide Bombings in Surabaya and Sibolga', *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8.5 (2019), 873–76 <<https://doi.org/10.35940/ijeat.E1123.0585C19>>.

⁷ Dian Damayanti, 'Implementation of the Cyber Terrorism Prevention, and Rehabilitation Policy in Polda Metro Jaya Police in Central Jakarta', *IBIMA Business Review*, 2021 (2021), 1–10 <<https://doi.org/10.5171/2021.695424>>.

Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus tertua yang telah lahir sejak tahun 1947 menghasilkan sejumlah kader yang hari ini berperan secara nasional dalam berbagai sektor kehidupan baik politik ekonomi pemerintahan, militer, ulama dan akademisi. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMI termaktub bahwa HMI adalah organisasi kader yang bersifat nasional sekaligus religius menyeimbangkan antara Islam dan Indonesia sehingga jiwa nasionalisme Kader HMI adalah komitmen yang tidak dapat ditawar-tawar lagi apalagi HMI adalah organisasi yang lahir dan murni didirikan oleh orang-orang Indonesia.

Para alumni HMI yang saat ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat terbukti tidak terjurus kepada paham-paham radikal yang berafiliasi kepada organisasi terorisme nasional maupun internasional. Penghormatan kader HMI terhadap para senior sangat tinggi dan menjadikan para senior sebagai panutan. Para senior yang teruji nasionalismenya tentu saja berpengaruh kepada para kadernya untuk dicontoh. Para kader HMI juga intens dan rajin berkomunikasi dengan para senior dan alumni, sehingga pemikiran alumni HMI sangat berpengaruh bagi sikap politik para kader HMI.

Pendidikan dan Latihan kader HMI bersama organisasi ekstra kampus lainnya seperti PMII, IMM dan KAMMI diperkirakan dapat mencegah dan mengatasi mahasiswa dari pengaruh gerakan radikal yang merupakan akar munculnya terorisme di Indonesia. HMI mengajarkan kadernya untuk mendepankan fakta dan data daripada isu yang berkembang. Jika pun HMI harus melakukan perlawanan, perlawana itu harus dimulai dengan dialog terlebih dahulu, tidak langsung mengambil sikap konfrontasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatahillah dan kawan-kawan bersifat lebih umum yaitu semua organisasi ekstra kampus mahasiswa Islam. Penelitian lebih fokus hanya pada HMI.⁸ Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti yang membahas radikalisme pada umumnya di kalangan mahasiswa, tidak berfokus pada satu organisasi saja.⁹ Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Arfan yang berfokus pada semua organisasi ekstra kampus yang bernuansa Islam.¹⁰ Ketiga penelitian tersebut berfokus pada semua organisasi mahasiswa, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu organisasi yaitu HMI.

Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana organisasi HMI mengatasi paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan pemuda. Penelitian dimaksudkan untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang sangat sulit untuk diberantas diperlukan

⁸ Arjun Fatahillah, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Sidratahta Mukhta, 'Pencegahan Radikalisme Keagamaan Di Pemuda Indonesia : Studi Kasus Organisasi Mahasiswa Islam (Hmi, Pmii, Imm, Kammi) Periode Pengurus 2017-2021', *Journal of Terrorism Studies*, 4.2 (2022) <<https://doi.org/10.7454/jts.v4i2.1051>>.

⁹ Iis Sugiarti and Moh Roqib, 'Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi Umum (The Dissemination of Moderate Islamic Education to Students: Strategies to Counter Radicalism in Public University)', *Potret Pemikiran*, 25.2 (2021), 119 <<https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>>.

¹⁰ S. Sagap, Arfan, and Sya'roni, 'Bujang Damai: Pendidikan Sosial Nir Kekerasan Melayu Jambi Untuk Pendidikan Kader Muda Moderat Indonesia', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.2 (2021) <<https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1380>>.

satu gagasan atau metode baru yang dapat membendung pengaruh paham radikal dan teroris di kalangan anak muda dan mahasiswa. Gagasan baru yang dimaksud adalah bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus adalah salah satu cara mencegah radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana.

2. METODE

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan objek kajiannya adalah data tidak langsung atau sering disebut sebagai sekunder.¹¹ Penelitian menggunakan data sekunder atau penelitian dengan jenis yuridis normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum yang dilakukan dengan cara memepelajari dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan bukan data primer yang diperoleh langsung atau bukan lah data yang belum ada sebelumnya, tetapi data yang sebelumnya sudah tersedia. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang merupakan hasil penelitian para akademisi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam

Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri sejak tahun 1947 oleh Lapran Pane yang beranggotakan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa anggota HMI adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena itu mereka steril dari paham-paham asing yang mungkin bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Karena karena itu alumni dan Kader HMI adalah orang yang dapat menyeimbangkan antara keislaman dan keindonesiaan.

HMI adalah satu dari beberapa organisasi ekstra kampus yang anggotanya adalah mahasiswa di kampus. Organisasi serupa selain HMI adalah PMII, GMKI, GMNI, PMKRI dan hari ini ada organisasi KAMMI. Organisasi-organisasi tersebut memang organisasi di luar kampus, tapi kader-kadernya lah yang mengisi organisasi dalam kampus. Tempat perkaderan berorganisasi yang sebenarnya ada di organisasi ekstra kampus tersebut.

Berbeda dengan organisasi lainnya, HMI adalah organisasi pengkaderan yang tidak mendoktrin para anggotanya untuk tunduk kepada senior atau pimpinan melainkan membebaskan anggotanya untuk punya sikap dan pandangan sendiri terhadap berbagai persoalan kehidupan termasuk bagaimana mereka beribadah. Tidak ada doktrin taklik kepada pemimpin atau senioritas.

HMI bukan organisasi agama, akan tetapi anggotanya adalah orang yang beragama. Karena itu, menurut Husni Hentihu, HMI tidak terkotak dalam pemikiran dan aliran keagamaan tertentu. HMI menganut keterbukaan dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

kebebasan buat kader HMI untuk memilih paham ke Islaman mana yang sejalan dengan pemikiran mereka dengan slogan "berpikir bebas setelah berilmu tinggi".¹²

Hubungan antara junior dan senior adalah hubungan kekeluargaan semata, bukan hubungan hierarkis. Para junior tetap dituntut untuk kritis kepada para pemimpin dan senior. Cara pandang seperti ini menyebabkan alumni dan Kader HMI tidak mudah menerima pengaruh-pengaruh negatif dari orang-orang yang ingin menyebarkan paham-paham atau ideologi tertentu.

Tujuan HMI sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar HMI adalah untuk membina insan akademis yang dapat mencipta serta mengabdikan karya-karya ilmiah yang bernafaskan Islam. Tujuan HMI juga membina kader menjadi bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. HMI bersifat independen dimana ia tidak berafiliasi kepada organisasi mana pun khususnya organisasi politik. Itu sebabnya kader dan alumni HMI ada di semua partai politik. Status HMI adalah organisasi mahasiswa, sehingga anggotanya adalah mereka yang berstatus sebagai mahasiswa.

Usaha usaha untuk mencapai tujuannya adalah membina pribadi muslim yang sesuai dengan akhlakul karimah. Tujuan lain yaitu membina pribadi muslim yang mandiri, mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial dan budaya, memelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia, memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan agama Islam baik untuk kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. HMI juga bertujuan memperkuat *ukhuwah islamiyah* sesama umat Islam sedunia. HMI juga diharapkan berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi serta kepemudaan untuk mendukung pembangunan nasional. HMI juga harus ikut serta dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus latihan kader 1 (*basic training*) oleh pengurusan HMI cabang dan belum pernah menjadi anggota HMI sebelumnya. Setiap anggota Imi terdaftar sebagai anggota komisilat di perguruan tinggi fakultas tempat studinya jika ayat 2 tidak terpenuhi maka anggota hmb tersebut terdaftar di tempat mengikuti pelaksanaan latihan kader 1. Mereka yang tergabung sebagai anggota HMI atau alumni HMI setelah mereka tamat terbukti tidak terafiliasi dengan organisasi yang bersifat radikal dan cenderung menjadi organisasi sayap terorisme nasional maupun internasional.

Untuk mengetahui visi kebangsaan HMI, dapat dilihat berdasarkan konsep Nilai Dasar Perjuangan yang menjadi semacam buku suci yang wajib dipedomenai oleh kader HMI. Nilai Dasar Perjuangan atau Nilai Identitas Kader sangat dipengaruhi oleh pemikiran cendekiawan Muslim Nurkholis Madjid yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Pemikiran ini pada intinya bersikan tiga hal yaitu iman, ilmu dan amal. Pengembangan dari NDP ini berintikan sikap pluralisme, penghormatan terhadap semua agama namun tetap

¹² Amalia Yunia Rahmawati, 'Counter Radikalisme Melalui Pendidikan Akademis-Kultural Oleh Pemuda Bangkalan Madura Haeron', *Jurnal Tarbawi*, 11.01 (2022), 1-23.

menekankan pada iman Islam bagi setiap kader HMI. Nilai-nilai Dasar Perjuangan itu meliputi :

Tabel 1 Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI

No.	Nilai Dasar
1.	Dasar-dasar Kepercayaan
2.	Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan
3.	Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir)
4.	Ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan
5.	Individu dan Masyarakat
6.	Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi
7.	Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan

Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 tentang Nilai-nilai Perjuangan HMI di atas tergambar bahwa prinsip dasar yang diajarkan dalam Pendidikan dasar HMI adalah keindonesiaan dan keislaman. Kader HMI dibentuk untuk memahami Islam sekaligus mencintai bangsa dan negara. Untuk menjadi anggota HMI, seorang mahasiswa harus telah mengikuti dan lulus Latihan Kader I (*basic training*) yang diselenggarakan oleh pengurus Komisariat HMI.

Tabel 2 Materi Latihan Kader I

No.	Materi
1.	Sejarah peradaban Islam
2.	Nilai Dasar Perjuangan HMI
3.	Misi HMI
4.	Konstitusi HMI
5.	Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2 tentang Materi Latihan Kader di atas tergambar bahwa kader HMI selain memahami tentang ke HMI an tetapi juga harus memahami Sejarah peradaban Islam yang agung. Bagi mahasiswa yang fokus studinya pada kajian Islam atau alumni pondok pesantren, atau alumni madrasah, Sejarah peradaban Islam sudah merupakan materi wajib. Tetapi mereka yang alumni sekolah umum tidak pernah mendapatkan materi serupa.

Tabel 3 Materi Latihan Kader II

No.	Materi
1.	Teori-teori Perubahan
2.	Ideopolitor Strategi dan Taktik
3.	Studi Gerakan Islam
4.	Wawasan Nusantara
5.	Nilai Dasar Perjuangan
6.	Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3 di atas tergambar bahwa selain dibekali dengan pengetahuan tentang politik pada umumnya, para kader juga dibekali ilmu-ilmu keislaman.

Tabel 4 Materi Latihan Kader III

No.	Materi
1.	Nilai Dasar Perjuangan
2.	Doktrin dan Peradaban Islam
3.	Wawasan Nusantara
4.	Wawasan Internasional
5.	Analisis Ekonomi Politik
6.	Strategi dan Taktik

Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4 atas tergambar bahwa materi doktrin dan peradaban Islam juga diselipkan dalam materi yang penting bagi seorang kader HMI. Setelah seorang mahasiswa menamatkan studinya, ia otomatis terdaftar sebagai anggota alumni HMI yang diorganisir dalam organisasi Korps Alumni HMI disingkat KAHMI.

Beberapa tokoh nasional yang merupakan alumni HMI antara lain :

Tabel 5 Beberapa Tokoh Nasional Alumni HMI

No.	Nama
1.	Akbar Tanjung
2.	Jusuf Kalla
3.	Mohd Mahfud MD
4.	Hidayat Nur Wahid
5.	Yusril Ihza Manhendra
6.	Amien Rais
7.	Azzumardi Azra
8.	Anis Baswedan
9.	Dan lain-lain

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 5 tergambar bahwa alumni HMI telah tersebar dalam berbagai bidang pengabdian yang meluas tidak pada satu bidang saja. Di antara para tokoh tersebut, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan paham politik. Itu lah independensi HMI yang membuatnya berbeda dengan organisasi lain.

Para alumni HMI yang menduduki jabatan di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan telah memberikan contoh nyata komitmen kebangsaan Indonesia, lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Ini menjadi teladan bagi para kader karena hubungan antara alumni dengan kader HMI sangat dekat. Para kader memanggil para alumni dengan sebutan kanda dan yunda.

3.2. Strategi Kebijakan Non Penal dengan Pendidikan Kader HMI

Model penegakan hukum yang dikenal di seluruh dunia meliputi dua hal yaitu kebijakan Represif atau kebijakan penal dan kebijakan yang bersifat

preventif atau kebijakan non penal. Kebijakan non penal adalah kebijakan tanpa proses pidana melalui system peradilan pidana.¹³

Ketika kebijakan represif terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan kejahatan di tengah masyarakat dengan menggunakan hukum pidana maka kebijakan yang bersifat represif menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat termasuk salah satunya adalah persoalan tindak pidana terorisme.¹⁴

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme mulai dari pidana penjara waktu tertentu hingga pidana mati terbukti tidak dapat menghambat berkembangnya paham terorisme di Indonesia. Dengan demikian, maka sangat diperlukan kebijakan yang bersifat alternatif yaitu kebijakan non penal yang bersifat preventif. Kebijakan non penal yang bersifat preventif adalah dengan cara membendung pengaruh paham radikal di kalangan anak muda dan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaku terorisme di Indonesia adalah kelompok milenial. Contoh kasus tersebut antara lain pada 28 Agustus 2016, seorang remaja berusia 17 tahun melakukan serangan terhadap sebuah gereja di Medan, Indonesia.

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia selama ini yang dilakukan cara penal semata terbukti tidak efektif mencegah terjadinya kembali aksi terorisme. Kebijakan yang bersifat non penal yaitu dengan program deradikalisasi terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pun berjalan kurang optimal, dimana masih banyaknya aksi terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia.¹⁵

Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah kader dan alumni HMI beserta rekam jejaknya dalam wawasan kebangsaan membuktikan bahwa mereka yang pernah mengikuti pelatihan kader HMI tidak mudah untuk ikut dalam organisasi-organisasi yang di kemudian hari terafiliasi gerakan terorisme nasional atau internasional.¹⁶ Mengapa demikian? Karena HMI didirikan oleh mahasiswa Indonesia dan didirikan di Indonesia. HMI tidak berafiliasi dengan organisasi manapun baik dalam maupun luar negeri. HMI merancang sendiri kurikulum pelatihan, tidak mencontoh organisasi lain.

Hal ini sejalan dengan materi dan kurikulum Pendidikan dan Latihan Kader HMI sebagaimana tergambar di atas serta pengamalan Nilai Dasar Perjuangan. Anggota dan alumni HMI tidak mudah terprovokasi karena dituntut untuk kritis dalam menyikapi suatu isu, dituntut pula untuk memiliki ilmu dan data dalam mengambil sikap menghadapi isu dan persoalan tertentu.

¹³ Purwoto Purwoto, 'Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures', *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14.4 (2020), 3053–57 <<https://doi.org/10.37506/ijfnt.v14i4.12054>>.

¹⁴ Shaban Mohammadi, Nader Naghshbandi, and Zahra Moridahmadibezdi, 'Investigating the Impact of Audit Features on Money Laundering: Evidence from Iranian Stock Exchange Companies', *Journal of Money Laundering Control*, 23.4 (2020), 913–30 <<https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0072>>.

¹⁵ Subagyo.

¹⁶ Vaibhav Chadha, 'Freedom of Speech and Expression Versus the Glorification of Acts of Terrorism: Defining Limits in the Indian Context', *Age of Human Rights Journal*, 17.17 (2021), 54–78 <<https://doi.org/10.17561/TAHRJ.V17.6416>>.

Anggota dan alumni HMI juga tidak akan menempuh sikap yang radikal tetapi lebih mengedepankan politik akomodasi sebagaimana slogan, “lebih baik bersanding daripada bertanding.” Sesuai visi ‘insan cita’, maka anggota dan alumni HMI memilih untuk memiliki keimanan, ilmu dan mengamalkan iman dan ilmu untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Dalam berbagai dokumen HMI, dua kata yaitu umat dan bangsa selalu bergandengan. Itu lah keseimbangan yang wajib dijaga oleh segenap anggota dan alumni HMI sebagaimana tergambar pula dalam logo HMI yang menggambarkan warna hijau yang melambangkan kebesaran Islam dan hitam (simbol kebangsaan) secara berimbang.

Sesuai dengan pemikiran Nurkholis Madjid yang pernah menempuh pendidikan agama sekaligus pendidikan barat di Amerika, pemikiran dan cara pandang anggota dan alumni HMI adalah memandang Islam secara global, dan kemanfaatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan materi dan prinsip dasar seperti ini, tidak mungkin anggota dan alumni HMI ikut serta menjadi bagian gerakan radikal yang bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai gerakan radikal dari luar Indonesia yang dapat menjadi embrio gerakan terorisme di Indonesia.

Prinsip dan sikap pluralis yang menghargai perbedaan sebagaimana konsep Pancasila, dianggap sebagai satu-satunya saluran bagi agama untuk berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat Indonesia dalam mencegah terorisme.¹⁷ Di Amerika Serikat, kebijakan utama mengatasi terorisme juga dilakukan dengan mempengaruhi interpretasi konteks ini untuk memberdayakan kaum puritan yang pada dasarnya Anti Barat dan anti Amerika.¹⁸ Jika di Amerika saja, kebijakan yang bersifat non penal ini menjadi prioritas, maka apalagi seharusnya di Indonesia.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengungkapkan bahwa ciri-ciri khas teroris biasanya (1) membenci negara dan pemerintah serta berpandangan terhadap pemerintah sebagai *thaghut* (berhala selain Allah, Tuhan yang maha esa); (2) sulit bergaul dengan orang lain; (3) bersikap asosial dan tidak menyatu dengan orang lain; (4) bersikap tertutup; dan (5) lebih suka mengunjungi konten radikal di internet; dan (6) memilih tidak ikut shalat jama'ah karena merasa mereka lebih taat daripada yang lain.¹⁹

Karena itu, Pendidikan dan Latihan Kader HMI seperti mungkin juga pelatihan kader organisasi mahasiswa ekstra lainnya perlu disebarluaskan di kalangan mahasiswa. Sayangnya, dewasa ini kecenderungan sejumlah mahasiswa untuk memilih masuk organisasi HMI lebih pada ketertarikan keberhasilan alumni HMI di masa setelah mereka menjadi alumni, bukan pada visi dan misi serta platform organisasi.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa perhatian pimpinan perguruan tinggi juga tidak maksimal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengikuti organisasi di luar kampus seperti HMI. Pelajaran pendidikan agama di

¹⁷ Benyamin Fleming Intan and Calvin Bangun, ‘Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia’, *Religions*, 13.5 (2022) <<https://doi.org/10.3390/rel13050429>>.

¹⁸ Saroja Dhanapal and others, ‘Criminalising Terrorism: An Overview Of Malaysia’s Anti-Terrorism Laws’, *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 15.1 (2020), 70–89 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3821141>>.

¹⁹ Nuswanto.

kampus hanya 2 kredit semester yaitu pertemuan sekali seminggu selama 1 jam 40 menit. Selebihnya mahasiswa mencari sumber sendiri dalam memahami agama. Di masa kritis yang sedang berkembang dalam pencarian ilmu pengetahuan, pencarian kebenaran agama ditemukan sendiri melalui berbagai sarana elektronik yang tidak sepenuhnya benar.

Seharusnya, pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi berkembangnya organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMI untuk dapat menampung sebanyak mungkin mahasiswa yang bergabung di dalamnya. Selain menjadi bagian deradikalisasi di kalangan mahasiswa yang dapat mencegah mahasiswa terjerumus dalam organisasi radikal, Pendidikan dan Latihan Kader organisasi semacam HMI dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam pemahaman agama yang berujung pada sikap pluralis, toleran dan demokratis sesuai dengan visi misi dan tujuan HMI.

Manfaat lain yang didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra kampus adalah mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan organisasi juga melatih mereka terampil dalam publik speaking, berani dan percaya diri dalam berhadapan dengan orang banyak, mampu dan terampil dalam kepemimpinan dan mengelola konflik. Berbagai studi menunjukkan bahwa mereka yang terampil dan punya bakat kepemimpinan yang baik, pluralis, toleran, humanis, demokratis serta punya skill dalam berkomunikasi adalah mereka yang berlatarbelakang sebagai aktifis. Satu lagi kelebihan mereka yang ikut organisasi HMI adalah kemampuan mereka menuliskan ide dan gagasan karena dalam organisasi HMI, melalui latihan kader yang berjenjang, mereka dituntut untuk mampu menulis artikel dengan baik.

Kebijakan di luar hukum pidana, dewasa ini menempati posisi yang sangat sentral dianggap sebagai sarana pencegahan kejahatan yang efektif. Kebijakan penggunaan hukum pidana hanya dilakukan ketika masyarakat benar-benar membutuhkan. Hukum pidana diperlukan lebih pada alat pemaksa untuk melakukan perubahan, bukan sekedar mencerminkan, norma sosial, sikap, dan keyakinan di samping, dan dikombinasikan dengan, alat pembuat kebijakan non-pidana. Hukum pidana dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perubahan sosial.²⁰ Di luar hal itu, penggunaan sarana non hukum pidana sesungguhnya jauh lebih efektif. BNPT selaku badan negara yang tugasnya focus pada menangani tindak pidana terorisme juga perlu turut mempromosikan dan mendukung keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus.

4. PENUTUP

Untuk mengatasi tindak pidana terorisme diperlukan kebijakan non penal di luar hukum pidana yang salah satunya adalah di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI. Kebijakan non penal tersebut merupakan bagian gerakan deradikalisasi mahasiswa dan kalangan muda dari pengaruh pemahaman agama

²⁰ Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, 'Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18.1 (2019), 734-40 <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>>.

yang keliru dan cenderung radikal sebagai bibit dan embrio gerakan teroris yang terafiliasi dengan gerakan terorisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Muhaimin Zulhair, 'Culture and Role of Woman in Terrorism in Indonesia. Case Studies: Suicide Bombings in Surabaya and Sibolga', *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8.5 (2019), 873–76 <<https://doi.org/10.35940/ijeat.E1123.0585C19>>
- Amalia Yunia Rahmawati, 'Counter Radikalisme Melalui Pendidikan Akademis-Kultural Oleh Pemuda Bangkalan Madura Haeron', *Jurnal Tarbawi*, 11.01 (2022), 1–23
- Chadha, Vaibhav, 'Freedom of Speech and Expression Versus the Glorification of Acts of Terrorism: Defining Limits in the Indian Context', *Age of Human Rights Journal*, 17.17 (2021), 54–78 <<https://doi.org/10.17561/TAHRJ.V17.6416>>
- Damayanti, Dian, 'Implementation of the Cyber Terrorism Prevention, and Rehabilitation Policy in Polda Metro Jaya Police in Central Jakarta', *IBIMA Business Review*, 2021 (2021), 1–10 <<https://doi.org/10.5171/2021.695424>>
- Dhanapal, Saroja, Nadhratul Wardah Salman, Johan Shamsuddin Sabaruddin, and Norbani Mohamed Nazeri, 'Criminalising Terrorism: An Overview Of Malaysia's Anti-Terrorism Laws', *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 15.1 (2020), 70–89 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3821141>>
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya, 'Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18.1 (2019), 734–40 <<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>>
- Fatahillah, Arjun, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Sidratahta Mukhta, 'Pencegahan Radikalisme Keagamaan Di Pemuda Indonesia : Studi Kasus Organisasi Mahasiswa Islam (Hmi, Pmii, Imm, Kammi) Periode Pengurus 2017-2021', *Journal of Terrorism Studies*, 4.2 (2022) <<https://doi.org/10.7454/jts.v4i2.1051>>
- Intan, Benyamin Fleming, and Calvin Bangun, 'Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia', *Religions*, 13.5 (2022) <<https://doi.org/10.3390/rel13050429>>
- Jarvis, Lee, 'Critical Terrorism Studies and the Far-Right: Beyond Problems and Solutions?', *Critical Studies on Terrorism*, 15.1 (2022), 13–37 <<https://doi.org/10.1080/17539153.2021.2017484>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Mohammadi, Shaban, Nader Naghshbandi, and Zahra Moridahmadibezdi, 'Investigating the Impact of Audit Features on Money Laundering: Evidence from Iranian Stock Exchange Companies', *Journal of Money Laundering Control*, 23.4 (2020), 913–30 <<https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0072>>
- Nuswanto, Heru Susetyo, 'Terrorism as Socially Constructed Crime in Indonesia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2019), 266–86 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4>>
- Phillips, Brian J., 'How Did 9/11 Affect Terrorism Research? Examining Articles

- and Authors, 1970–2019’, *Terrorism and Political Violence*, 00.00 (2021), 1–24 <<https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1935889>>
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, ‘International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism’, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5.1 (2021), 63–83 <<https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>>
- Purwoto, Purwoto, ‘Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures’, *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14.4 (2020), 3053–57 <<https://doi.org/10.37506/ijfimt.v14i4.12054>>
- Sagap, S., Arfan, and Sya’roni, ‘Bujang Damai: Pendidikan Sosial Nir Kekerasan Melayu Jambi Untuk Pendidikan Kader Muda Moderat Indonesia’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.2 (2021) <<https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1380>>
- Subagyo, Agus, ‘The Implementation of the Pentahelix Model for the Terrorism Deradicalization Program in Indonesia’, *Cogent Social Sciences*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>>
- Sugiarti, Iis, and Moh Roqib, ‘Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi Umum (The Dissemination of Moderate Islamic Education to Students: Strategies to Counter Radicalism in Public University)’, *Potret Pemikiran*, 25.2 (2021), 119 <<https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>>